



Eksekutif dan Legislatif Sepakat

Bahas Raperda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset

JOGJA - Setelah sempat berbeda pendapat, eksekutif dan legislatif akhirnya sepakat soal pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset. Pemkot dan DPRD Kota Jogja sepakat segera menyelesaikan pembahasan raperda tersebut agar XT Square dapat beroperasi tepat waktu, Juli mendatang.

"Semuanya sudah siap. Baik dana penyertaan modal dari APBD maupun seluruh bahan raperdanya tinggal masuk ke pembahasan antara dewan dengan tim dari eksekutif," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Aman Yuriadjaya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kota Jogja, kemarin (8/2).

Aman menjelaskan, pihaknya optimistis pembahasan raperda penyertaan modal dan pemisahan aset BUMD Aneka Usaha yang menjadi manajerial dari XT Square bisa selesai sesuai jadwal. Sebab, APBD telah menetapkan Rp 3 miliar untuk modal BUMD tersebut. Kini, operasional BUMD tinggal menunggu payung hukum pencairan modal awal tersebut.

"Operasional BUMD sebenarnya sudah ada payung hukumnya dengan Perda BUMD Aneka Usaha. Hanya

untuk pencairan modal awal, kami harus membuatkan payung hukumnya terlebih dahulu," imbuh Aman, saat ekpose BUMD XT Square di hadapan wakil rakyat.

Selain untuk landasan hukum pencairan modal awal, raperda juga dibutuhkan untuk memperjelas posisi aset yang akan dikelola oleh BUMD. Aset senilai Rp 49 miliar untuk tanah di bekas terminal dan Rp 28 miliar untuk nilai bangunan XT Square harus mendapatkan legalitas hukum ketika dilimpahkan kepada BUMD.

"Dengan adanya raperda ini, BUMD lebih jelas. Apa saja asetnya yang menjadi dari kewenangannya," terangnya.

Anggota dewan dari Komisi B DPRD Kota Jogja Danang Wahyubroto sepakat dengan eksekutif, jika pembahasan raperda penyertaan modal dan pemisahan aset ini menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan dewan bisa segera memasukkan raperda tersebut ke dalam program legislasi daerah (Prolegda).

"Karena raperda ini merupakan ikutan dari pengesahan APBD dan Raperda BUMD, makanya pembahasan ini mendesak segera diselesaikan. Minimal Maret awal, pembahasannya sudah bisa selesai," kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Jogja ini.

Meski hanya ikutan dari dua perda

yang telah mereka tetapkan 2010 silam, pihaknya menganggap raperda penyertaan modal dan pemisahan aset merupakan hal penting bagi BUMD. Sebab, dengan adanya raperda ini, otomatis operasional BUMD bisa terlaksana.

"Kalau tidak ada raperda ini, berarti BUMD tidak memiliki modal. Lalu, mereka mau beroperasi dengan menggunakan uangnya siapa," ucapnya.

Selain menyoroti kesiapan raperda penyertaan modal dan pemisahan aset, Komisi B juga meminta penjelasan eksekutif soal pembentukan direksi. Dari rapat kerja ini, terungkap pembentukan direksi ternyata menulai kendala.

Yakni, belum disahkannya Perda BUMD Aneka Usaha yang telah diteliti gubernur menjadi lembaran daerah. "Kami masih menunggu pimpinan dewan untuk mengesahkan perda tersebut menjadi lembaran daerah. Karena, saat ini posisinya tinggal menunggu persetujuan pimpinan dewan," kata Aman lagi.

Ini membuat anggota dewan kembali mempertanyakan tata kala yang telah ditetapkan eksekutif. Dewan memiliki asumsi pembentukan direksi dan dewan pengawas ini bakal molor melihat progres yang tak menggembirakan. "Seharusnya, mereka memiliki target lembaran daerah kapan ditetapkan pimpinan sehingga bisa berlaku," tandas Rizki Listianto, anggota Komisi B lain. **(eri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005